

**SISTEM PENGAWASAN *REPRESIF* TERHADAP PANITIA
PENGAWAS DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ANSORI
011400319**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2018**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ANSORI

NIM : 011400319.P

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : SISTEM PENGAWASAN REPRESIF TERHADAP
PANITIA PENGAWAS DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH



Palembang, 27 DESEMBER 2018

Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rianda Riviyusnita". The signature is written in a cursive style.

Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH., MKn

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Winda Arista". The signature is written in a cursive style.

WINDI ARISTA, SH., MH

SISTEM PENGAWASAN *REPRESIF* TERHADAP PANITIA PENGAWAS DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

PENULIS :
ANSORI
011400319

PEMBIMBING PERTAMA :
DR.HJ.RIANDA RIVYUSNITA, SH., M.Kn.
PEMBIMBING KEDUA :
WINDI ARISTA, SH., MH.

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan skripsi ini adalah bagaimanakah sistem pengawasan *represif* terhadap panitia pengawas dalam pemilihan umum kepala daerah dan bagaimanakah peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum pemilihan umum.

Oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum.

Hasil kesimpulan dalam penelitian ini bahwa sistem pengawasan *represif* terhadap panitia pengawas dalam pemilihan umum kepala daerah merupakan pengawasan dari tahapan persiapan hingga tahapan penyelenggaraan. Panwas dalam hal ini masih ikut mengawasi sampai pada penetapan hasil pemenang calon kepala daerah Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengeluarkan berita acara pemenang calon. Peranan badan pengawas pemilihan umum dalam penegakan hukum pemilihan umum yaitu apabila terdapat perbedaan pendapat antar Panwas dan KPU hal ini dapat dilakukan dengan cara proses penyelesaian pelanggaran oleh panwas. Namun pelanggaran pada masa pilkada dapat dikatakan efektif apabila diselesaikan oleh Panitia Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Tindak lanjut yang dilakukan oleh panitia pengawas terhadap pelanggaran dapat diselesaikan dengan baik sesuai fungsi dan kewenangan yang berlaku.

Rekomendasi diberikan kepada lembaga Panwas sebagai pelaksana kegiatan pemilu panwas dalam pengawasannya lebih ikut serta dan berperan aktif sehingga hasil akhir dari penghitungan suara tidak bisa diganggu gugat. Pengawasan disetiap tahapan harusnya lebih diperkuat oleh panitia pengawasan pemilu, sehingga laporan akhir pelaksanaan dapat tersusun dan terinci dalam laporan akhir.

Kata kunci : *Pemilihan Umum (Pemilu), Panitia Pengawas, Represif*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	10
B. Permasalahan	10
C. Ruang Lingkup	10
D. Metodologi	10
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian, Asas dan Fungsi Pemilihan Umum	16
B. Makna Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	19
C. Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum	23
1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum	23
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum	26
D. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	30
E. Tinjauan Tentang Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu)	31
F. Penegakan Hukum dan Unsur-Unsur Penegakan Hukum Pemilu	33
BAB III SISTEM PENGAWASAN <i>REPRESIF</i> TERHADAP PANITIA PENGAWAS DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH	
A. Sistem Pengawasan <i>Represif</i> Terhadap Panitia Pengawas Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah	42
B. Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum	54
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah penulis jelaskan melalui teori dan meneliti yang dituangkan dalam hasil penelitian dan pembahasan yang telah di lakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem pengawasan *represif* terhadap panitia pengawas dalam pemilihan umum kepala daerah merupakan pengawasan dari tahapan persiapan hingga tahapan penyelenggaraan. Panwas dalam hal ini masih ikut mengawasi sampai pada penetapan hasil pemenang calon kepala daerah Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengeluarkan berita acara pemenang calon.
2. Peranan badan pengawas pemilihan umum dalam penegakan hukum pemilihan umum yaitu apabila terdapat perbedaan pendapat antar Panwas dan KPU hal ini dapat dilakukan dengan cara proses penyelesaian pelanggaran oleh panwas. Namun pelanggaran pada masa pilkada dapat dikatakan efektif apabila diselesaikan oleh Panitia Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Tindak lanjut yang dilakukan oleh panitia pengawas terhadap pelanggaran dapat diselesaikan dengan baik sesuai fungsi dan kewenangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan panwas dapat dinilai sudah cukup efektif dilakukan apabila sesuai

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012.
- Achmad Dodi Haryadi, *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Arief Hidayat, disertasi, *Kebebasan Berserikat dan Berkumpul Di Indonesia*, Disertasi tidak diterbitkan, Semarang, Universitas Diponegoro, 2006.
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Idrus Affandi, *Tata Negara*, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta 1998.
- Limly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Miriam Budiardj, *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Surandim Achmad, "Perilaku Memilih Masyarakat Pedesaan dalam Pilkada langsung di Kabupaten Pati (Studi Kasus Pilkada Langsung di Desa Karaban dan Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, Tanggal 24 Juli 2006)", Skripsi Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro (tidak dipublikasikan).